

# AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN KINERJA UPK KECAMATAN PNPM MANDIRI PEDESAAN

**Hari Susanto, Supranoto dan Hary Yuswadi**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Jln. Kalimantan, Kampus Tegalboto, Jember 68121

Telp. (0331) 335586-331342, Fax. (0331) 335586

**Abstract: Accountability, Transparency and Performance UPK PNPM Mandiri Rural District.** This study aims to determine the effect of accountability and transparency on the performance of Activity Management Unit (UPK) District in PNPM Rural in Situbondo, either partially or simultaneously. Survey methods combined with a causal relationship approach applied in this study. The research instrument was a questionnaire, as the unit of analysis of the organization, the number of respondents overall total of 39 people, consisting of the entire board chairman, secretary and treasurer of a UPK 13 districts. The primary data of respondents' perceptions of transparency and accountability to the organization's performance is measured using questionnaires that have been tested level of validity (validity) and reliability (reliability). Multiple linear analysis was used to analyze the data. The results showed that accountability and transparency has a positive influence both simultaneously and partially on the performance of Activity Management Unit (UPK) District in PNPM Rural in Situbondo.

**Keywords:** accountability, transparency, organizational performance, activity management unit

**Abstrak: Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja UPK Kecamatan PNPM Mandiri Pedesaan.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan pada PNPM Mandiri Pedesaan di Kabupaten Situbondo, baik secara parsial maupun simultan. Metode survey dikombinasikan dengan pendekatan hubungan kausal diterapkan dalam penelitian ini. Instrumen penelitian adalah kuesioner, karena unit analisisnya organisasi, maka jumlah responden keseluruhan sebanyak 39 orang, terdiri dari seluruh pengurus ketua, sekretaris dan bendahara dari 13 UPK kecamatan. Data primer berupa persepsi responden tentang transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja organisasi diukur dengan menggunakan kuisener yang telah diuji tingkat kesahihan (validitas) dan keandalannya (realibilitas). Analisis linier berganda digunakan untuk menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi mempunyai pengaruh positif baik secara simultan maupun parsial terhadap kinerja Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan pada PNPM Mandiri Pedesaan di Kabupaten Situbondo.

**Kata kunci:** akuntabilitas, transparansi, kinerja organisasi

## PENDAHULUAN

Isu yang tidak pernah berhenti khususnya pada setiap Negara berkembang adalah faktor kemiskinan dan pengangguran. Permasalahan tersebut merupakan tugas dan kewajiban pemerintah, maka untuk itu perlu dikeluarkan beberapa kebijakan seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui ekspor serta investasi, menggerakkan sek-

tor riil untuk menciptakan lapangan kerja, adanya revitalisasi bidang pertanian dan ekonomi di pedesaan. Beberapa kebijakan pemerintah untuk menangani permasalahan kemiskinan dan pengangguran ternyata hasilnya tidak sia-sia, berita Statistik BPS No 35/05/Th.XVI, 6 Mei 2013 menyebutkan bahwa jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2013 mengalami kenaikan

terutama di sektor perdagangan, tercatat naik sebesar 3,29%, pada sektor konstruksi juga mengalami pertumbuhan sebesar 12,95%. Sejalan dengan menurunnya tingkat pengangguran di Indonesia, jumlah penduduk miskin turut berkurang.

Beberapa penyebab kemiskinan dan pengangguran di Indonesia, di antaranya adalah dari faktor manusianya, kebiasaan di masyarakat serta lemahnya dalam memahami dan menerapkan perangkat institusi tertulis maupun yang tidak tertulis. Sumodiningrat (2007) menyatakan arah kebijakan pembangunan nasional, di antaranya adalah kebijakan pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Bentuk kebijakan yang diterapkan adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, hal mana ruang lingkupnya terfokus pada pemberdayaan masyarakat pedesaan. Program ini mengadopsi mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dilaksanakan sejak 1998-2007, yang menekankan pada penguatan sistem pengelolaan kepentingan publik di tingkat lokal. Widodo (2002) menjelaskan PPK bertujuan di antaranya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, melakukan pengawasan terhadap program pembangunan di desa, mengembangkan dan memperkuat kelembagaan pembangunan di desa atau antar desa. Program pemberdayaan dilaksanakan di Kabupaten Situbondo sejak tahun 2001 hingga saat ini. Dari 17 kecamatan di Kabupaten Situbondo, hanya 13 lokasi kecamatan yang melaksanakan PNPM-Mandiri Pedesaan. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan sebagai pelaku PNPM Mandiri Pedesaan mempunyai peran penting dalam mengelola kegiatan PNPM di masyarakat desa.

Pada pelaksanaan PNPM terdapat beberapa UPK Kecamatan yang telah mendapatkan penghargaan dari Menteri Dalam Negeri sebagai UPK PNPM Mandiri Pedesaan terbaik nasional dengan kategori A atas keberhasilannya di tingkat nasional dan propinsi. Data pendukung menyebut-

kan, kegiatan dana bergulir terdiri dari Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Per-bulan Desember 2013 total asset (Dana Bergulir) UPK Kabupaten Situbondo telah mencapai Rp 36.667.751.974,-. Jumlah asset tersebut berasal dari penyerapan modal awal dana program sebesar Rp. 24.627.906.900. Artinya dari jumlah asset dibandingkan dengan modal awal, telah terjadi kenaikan atau perkembangan dana sebesar Rp. 12.039.845.074,- (48,8%). Selain itu terjadi peningkatan jumlah kelompok pemanfaat yakni berasal dari kelompok SPP dari 1944 kelompok menjadi 2071 kelompok, sedangkan kelompok UEP dari 319 kelompok menjadi 436 kelompok. (Profil Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur, 2013). Kenyataan tersebut mengindikasikan bahwa kinerja UPK Kecamatan pada Program PNPM-MPd relatif berhasil sesuai dengan tujuan program.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas serta hasil identifikasi terhadap fakta empirik lainnya, maka rumusan masalah penelitiannya adalah apakah terdapat pengaruh prinsip akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja UPK Kecamatan pada PNPM Mandiri Pedesaan di Kabupaten Situbondo.

Pengertian akuntabilitas menurut LAN RI dan BPKP (2001) dan Stanbury (dalam Ismiarti, 2013) mengartikan bahwa akuntabilitas sebagai kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Selanjutnya transparansi menurut UNDP (dalam Mardiasmo, 2009) adalah dibangun atas dasar kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh akses informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya. Pengertian kinerja organisasi, menurut Rummler dan Brache (dalam Sudarmanto, 2009) dan

Wibawa (1992) mengemukakan bahwa kinerja organisasi adalah pencapaian hasil pada level atau unit analisis organisasi terkait dengan tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi.

Pengaruh akuntabilitas dan transparansi pada kinerja organisasi dijelaskan oleh Rahmanurrasjid (2008) hal mana penerapan azas akuntabilitas dan transparansi mengharuskan pemerintah memberikan pertanggungjawaban dan informasi kepada masyarakat terkait pengelolaan pemerintahan sehingga terdapat upaya untuk memberikan yang terbaik (kinerja yang baik). Werimon, (2007) menyatakan adanya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi menyebabkan kontrol yang besar dari masyarakat sehingga pemerintahan akan bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada, akhirnya akan menghasilkan kinerja yang baik.

Temuan Auditya, dkk. (2013) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu menyatakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Propinsi Bengkulu, begitu juga hasil penelitian Garini (2011) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah pada dinas di Kota Bandung mengemukakan bahwa terdapat pengaruh variabel transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah di Kota Bandung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi pada kinerja UPK Kecamatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Situbondo.

**METODE**

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, jenis penelitian adalah eksplanasi/ *Explanatory* dengan pendekatan kuantitatif. Satuan unit analisis ini adalah Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan PNPM-MPd Kecamatan di wilayah Situbondo. Teknik

pengumpulan data adalah menggunakan kuesioner pada semua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan di seluruh wilayah Situbondo sebanyak 13 kecamatan. Karena unit analisisnya organisasi, maka sampelnya diambil secara purposive yaitu pengurus inti sebanyak 3 orang (ketua, sekretaris dan bendahara), sehingga total sampel sebanyak 39 orang.

Teknik pengukuran variabel menggunakan Skala Likert, untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok tentang kejadian atau gejala sosial pada tingkat ordinal (misal setuju, tidak setuju). Analisa data menggunakan uji validitas, disamping itu juga menggunakan uji reliabilitas. Karena hasil skala Likert ini ordinal maka untuk menjadi parametrik harus dilakukan transformasi data untuk ditingkatkan menjadi skala interval dengan menggunakan *Method Successful Interval* (MSI). Selanjutnya melakukan analisis regresi linier berganda, uji regresi secara simultan/ bersama-sama (*F test*) dan analisis koefisien determinasi berganda ( $R^2$ ) dan uji parsial (*t test*). Pada pengujian ini, peneliti menggunakan program SPSS 15.00.

**HASIL**

**Analisis Regresi Linear Berganda**

Berdasarkan pengujian diperoleh hasil yang dapat disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 1. Hasil Perhitungan Regresi Linear Berganda**

Variabel	Koef. Regresi	t hitung	t tabel	Sig.	Keterangan
Konstanta	12,538	2,687	2.023	0,011	-
Akuntabilitas	0,177	2,430	2.023	0,020	Hi diterima
Transparansi	0,394	2,718	2.023	0,010	Hi diterima

Sumber: Hasil data yang diolah menggunakan SPSS 15.00

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda maka:

$$Y = 12,538 + 0,177X_1 + 0,394 X_2$$

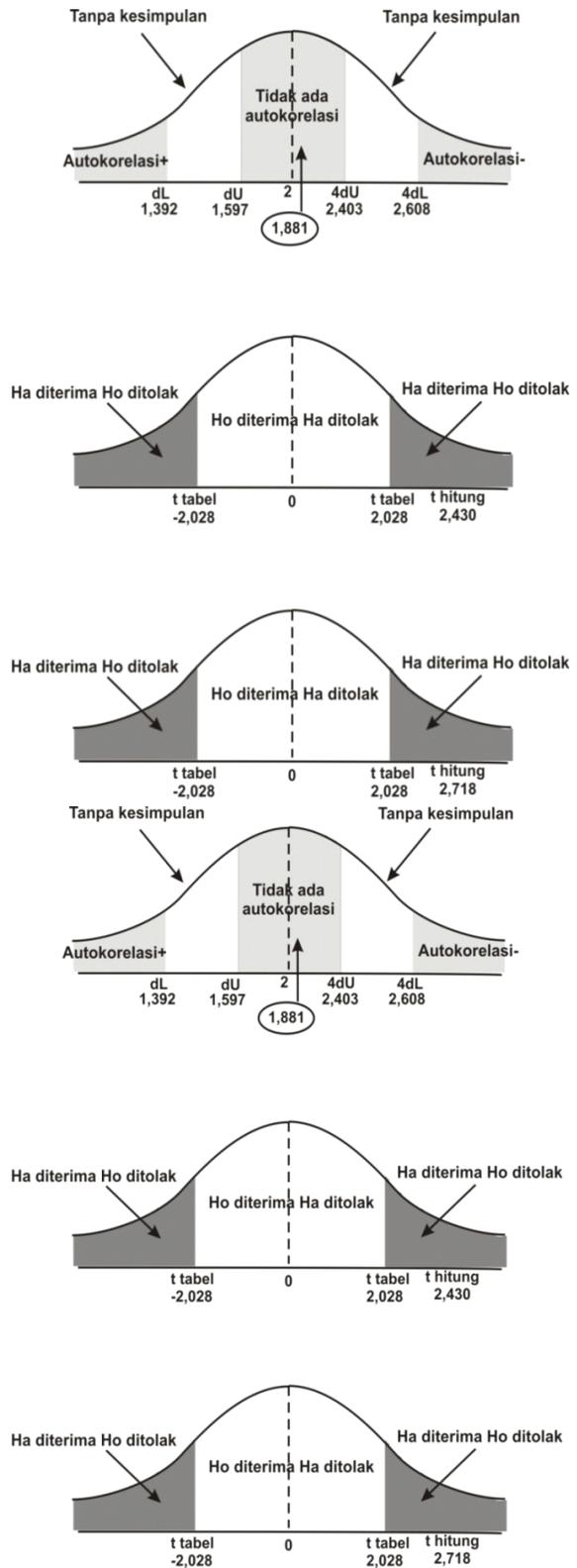
Interpretasi atas hasil analisis tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 12,538, menjelaskan bahwa kinerja UPK Kecamatan sebesar (+)12,538 artinya tanpa adanya variabel lainnya yakni variabel akuntabilitas dan transparansi, maka kinerja UPK Kecamatan dikatakan bagus yakni positif sebesar 12,538.
2. Koefisien regresi  $X_1 = 0,177$ , dengan tingkat signifikansi 0,020 ( $\alpha < 0,05$ ). Koefisien regresi ini dapat menjelaskan jika variabel independen lain nilainya tetap, maka setiap ada satu peningkatan  $X_1$  (variabel akuntabilitas), akan meningkatkan kinerja UPK Kecamatan sebesar 0,177.
3. Koefisien regresi  $X_2 = 0,394$ , dengan tingkat signifikan 0,010 ( $\alpha < 0,05$ ). Koefisien regresi ini menjelaskan jika variabel independen lain nilainya tetap, maka setiap ada satu peningkatan variabel  $X_2$  (transparansi), akan meningkatkan kinerja UPK Kecamatan sebesar 0,394.

**Analisis Parsial (t test)**

Pada tabel 1 disebutkan untuk variabel akuntabilitas nilai t hitung sebesar 2,430 dengan sig. 0,020 dan variabel transparansi nilai t hitung sebesar 2,718 dengan sig. 0,010. Nilai sig. kedua variabel masing-masing lebih kecil daripada  $\alpha = 5\%$ . Untuk mencari nilai t tabel, tabel distribusi t dicari pada  $\alpha = 5\% : 2 = 2,5\%$  (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df)  $n-k-1$  atau  $39-2-1 = 36$  (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen). Dengan pengujian 2 sisi (signifikansi = 0,025) hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 2,028. Nilai t hitung kedua variabel juga lebih besar daripada t tabel yakni 2,028 ( $2,028 < 2,430$  dan  $2,028 < 2,718$ ), atau  $H_0$  diterima,  $H_a$  ditolak. Dapat dikatakan bahwa masing-masing variabel independen (variabel akuntabilitas dan transparansi) secara parsial terdapat berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kinerja UPK Kecamatan PNPM Kabupaten Situbondo. Dapat dijelaskan pada gambar 1.



**Gambar 1. Kurva hasil Uji t dua variabel akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja UPK.**

**Uji Regresi secara Simultan/Bersama-sama (*F test*)**

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja UPK Kecamatan secara bersama-sama. Hasil uji F dapat dinyatakan pada tabel 2.

**Tabel 2. Hasil Perhitungan Uji F**

Dependent Variable	Independent Variable	R <sup>2</sup>	F hitung	F tabel	Sig.
Y	X <sub>1</sub> , X <sub>2</sub>	0,385	11,278	3,259	0,000

Sumber: Hasil data yang diolah menggunakan SPSS 15.00

Hasil F tabel 2 adalah 3,259 dan lebih kecil daripada F hitung (3,259 < 11,278) dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,005 dikatakan bahwa model regresi dapat dipakai untuk memprediksi kinerja UPK Kecamatan, atau dinyatakan variabel akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UPK Kecamatan.

**Analisis Koefisien Determinasi Berganda (R<sup>2</sup>)**

Memperhatikan hasil analisis pada tabel 2 di atas, diperoleh hasil koefisien determinasi berganda (*R Square*) sebesar 0,385 hal ini berarti besarnya sumbangan pengaruh variabel akuntabilitas dan transparansi terhadap variabel kinerja UPK Kecamatan sebesar 38,5%, sedangkan sisanya sebesar 61,5% disebabkan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam persamaan regresi ini.

**PEMBAHASAN**

Dari hasil pengolahan dan uji analisa data dapat dijelaskan bahwa kinerja organisasi dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan pada PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Situbondo dikategorikan baik dan positif. Selain itu ditemukan kuatnya pengaruh prinsip akuntabilitas pada kinerja UPK PNPM MPd Kabupaten Situbondo. Pada analisis deskriptif kuantitatif menyatakan bahwa tingkat akuntabilitas

pelaku PNPM-MPd tergolong baik, berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak internal dan eksternal program, seperti dari inspektorat Kabupaten Situbondo, DPRD Kabupaten Situbondo, BPKP, satker provinsi, RMU, hingga NMC (*National Management Consultant*), tim dari World Bank International dan *World Bank Indonesia*. Dengan dilaksanakannya prinsip akuntabilitas/ pertanggungjawaban tersebut maka kinerja UPK Kecamatan dinilai semakin bagus serta dipercaya untuk mengembangkan program-program lainnya di masyarakat.

Selain itu pada hasil uji analisis ditemukan kuatnya pengaruh prinsip transparansi pada kinerja UPK PNPM MPd Kabupaten Situbondo. Analisis deskriptif kuantitatif menyatakan bahwa tingkat transparansi pelaku PNPM-MPd tergolong baik, berpengaruh positif dan signifikan, hal ini dikarenakan pelaksanaan dan cara kerja organisasi tersebut selalu mendasarkan pada prinsip-prinsip keterbukaan pada semua pihak. Pelaku UPK PNPM-MPd memberikan akses informasi kepada semua masyarakat melalui, media elektronik, media cetak dan secara manual berupa pengumuman pada tempat yang strategis sehingga publik dapat mengetahui segala program dan kegiatan PNPM-MPd. PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Situbondo. Pemberian akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan, pelaksanaan kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya yang dilakukan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kabupaten Situbondo adalah pelaksanaan dari prinsip transparansi. (Krina, 2003).

Pelaksanaan prinsip transparansi telah meningkatkan kinerja UPK PNPM MPd Kabupaten Situbondo, dengan melakukan pemberian informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik, begitu juga keadministrasian dan keuangan serta informasi untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. (Mardiasmo, 2004).

Dari hasil analisis regresi penelitian dapat diketahui bahwa variabel independen (akuntabilitas dan transparansi) secara bersama-sama/simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (kinerja UPK Kecamatan). Hal ini dapat dibuktikan dari nilai F hitung sebesar 11,278 lebih besar daripada F tabel yakni 3,259 ( $3,259 < 11,278$ ) dengan probabilitas 0,000 jauh lebih kecil dari 0,05 atau 5%, sehingga dapat dikatakan model regresi bisa dipakai untuk memprediksi kinerja UPK Kecamatan, atau dapat dinyatakan bahwa variabel akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UPK Kecamatan di Kabupaten Situbondo. Kedua variabel secara simultan berpengaruh pada kinerja UPK Kecamatan, hal ini menunjukkan bahwa segala hasil pelaksanaan kegiatan PNPM-MPd dipertanggungjawabkan oleh UPK Kecamatan kepada pihak pemberi amanah serta dinformasikan secara terbuka kepada masyarakat maupun pihak yang terkait lainnya sehingga kepercayaan masyarakat semakin meningkat terhadap PNPM-MPd, terbukti bahwa jumlah pemanfaatan pada program ini semakin bertambah, termasuk juga beberapa UPK Kecamatan yang mendapatkan penghargaan dengan nilai A. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja UPK Kecamatan di Kabupaten Situbondo semakin bagus. Dari hasil penelitian ini, sebagai implementasi teoritik diharapkan bahwa setiap kegiatan organisasi baik publik, sektor publik, privat serta organisasi lainnya hendaknya mengacu dan mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance*, minimal melaksanakan prinsip-prinsip dasarnya yakni akuntabilitas dan transparansi guna meningkatkan kinerja organisasinya. Dari hasil penelitian ini pula menghasilkan implikasi kebijakan, bahwa hendaknya program-program pemerintah seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) atau program pemerintah lainnya yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat hendaknya harus tetap diselenggarakan, dengan selalu

mengacu pada prinsip-prinsip *Good Governance*, di antaranya prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Dapat dijelaskan bahwa setiap ada satu peningkatan pada indikator variabel transparansi akan meningkatkan kinerja UPK Kecamatan sebesar 0,394. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan prinsip transparansi seperti halnya mengakses informasi melalui saluran elektronik (TV), seperti media internet (Web, Blog, FB), media cetak seperti Tabloid Suara Mandiri Ruang Belajar Masyarakat (RBM) Situbondo serta melalui papan-papan pengumuman dapat berpengaruh pada kinerja UPK Kecamatan pada PNPM-MPd di Kabupaten Situbondo. Sehingga semakin banyak/inten/sering pelaksanaan pada indikator prinsip transparansi, maka semakin akan meningkat kinerja yang dilakukan UPK Kecamatan pada program PNPM-MPd di Kabupaten Situbondo.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang ada, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja UPK Kecamatan di Kabupaten Situbondo (yang terdiri dari 13 kecamatan). Koefisien regresi akuntabilitas sebesar (+) 0,177 dengan nilai signifikansi 0,020 ( $\alpha < 0,05$ ) mempunyai arti variabel akuntabilitas mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja UPK Kecamatan.

Terdapat pengaruh transparansi terhadap kinerja UPK Kecamatan di Kabupaten Situbondo. Koefisien regresi  $X_2 = (+) 0,394$ , dengan nilai signifikansi 0,010 ( $\alpha < 0,05$ ) artinya variabel transparansi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja UPK Kecamatan. Adanya transparansi yang di dalamnya terdapat penyediaan akses informasi yang jelas dan cepat, akan menambah wawasan dan pengetahuan terhadap penyelenggaraan PNPM Mandiri Perdesaan di masyarakat. Secara sistemik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap UPK Kecamatan, sehingga akan meningkatkan jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam program

tersebut, hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kinerja bagi UPK Kecamatan di Kabupaten Situbondo.

Hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,385. Hal ini menunjukkan bahwa besar pengaruh variabel independen yaitu akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja UPK Kecamatan di Kabupaten Situbondo dapat diterangkan oleh model persamaan ini adalah sebesar 38,5% dan sisanya sebesar 61,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak terlibat dalam model regresi ini.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2008. PTO. Petunjuk Teknis Operasional. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Profil PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Situbondo, BPMP Situbondo: 2013.